



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (L K I P)
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Tlp. Fax. (022) 6652559
Cimahi 40513

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 selesai disusun. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW.

LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 ini disusun seiring dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2018 ini adalah Laporan Hasil Kinerja Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018. LKIP ini menitikberatkan kepada tuntutan pertanggungjawaban suatu organisasi dengan berbasis evaluasi kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Akhirnya, semoga LKIP ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam mengemban amanat rakyat.

Cimahi, Januari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH

DADAN DARMAWAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19720130 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan harus mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut dapat diberikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan ini menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan program kerja untuk dievaluasi serta diperbaiki bersama-sama, agar permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya dapat diantisipasi.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah tulang punggung dalam pembiayaan daerah, karena tugas dan fungsinya merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk itu BAPENDA Kota Cimahi menetapkan sasaran yaitu, “Meningkatnya PAD”.

Target kinerja tahun 2018 ada yang dapat terpenuhi dan ada juga yang tidak. Adapun permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja dianalisis untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan. Hasil capaian target kinerja sasaran memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan upaya Bappenda secara keseluruhan baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya dalam mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 yaitu **“Meningkatnya PAD”** yang berkaitan dengan Misi Walikota ke II **“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik”** mencapai -290.94% termasuk dalam kategori **tidak baik**. Predikat ini setelah dianalisis memang dapat dijelaskan faktor penyebabnya, antara lain :

- 1) Bila dihitung secara jangka panjang yaitu selama 5 tahun, PAD Kota Cimahi rata-rata mengalami peningkatan sebesar 11,82%. Jadi sebenarnya PAD Kota Cimahi cenderung mengalami peningkatan, namun di Tahun 2017 terjadi anomali dimana beberapa komponen PAD meningkat drastis karena faktor eksternal diluar kendali Bappenda. Di satu sisi peningkatan ini memang menguntungkan keuangan Kota Cimahi Tahun 2017, namun di sisi lain saat mengukur peningkatan PAD Tahun 2018 terjadi penurunan sehingga seakan-akan Tahun 2018 kinerja Bappenda meningkatkan PAD dinilai buruk.
- 2) Apabila dilihat dari capaian realisasi PAD Kota Cimahi Tahun 2018 sebesar 102,49 maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kinerja Bappenda sudah tercapai dengan baik bahkan melebihi 100%. Target PAD tahun 2018 yang ditetapkan sudah merupakan hasil proyeksi peningkatan PAD dari target Tahun 2017 yaitu sebesar 5,10%. Dengan kata lain target PAD tahun 2018 sudah meningkat 5,10% dari target PAD tahun 2017 dan realisasi pencapaian target PAD Tahun 2018 telah tercapai sebesar 102,49%.

3) Setelah menganalisis masalah yang terjadi maka dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah perencanaan yang belum optimal dalam hal ini penetapan indikator kinerja dan proyeksi Target Pendapatan Daerah. Pengukuran pencapaian sasaran Bappenda Kota Cimahi "**Meningkatnya PAD**" yang semula indikator kinerjanya dihitung dari "**Persentase Peningkatan Realisasi PAD dari Tahun sebelumnya**" seharusnya dihitung dari **peningkatan target dan realisasi pencapaian targetnya**, karena target merupakan kondisi normal yang telah diperhitungkan dengan seksama namun jika hanya memperhitungkan realisasi dalam prakteknya banyak hal-hal diluar kendali Bappenda yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Penetapan proyeksi Pendapatan Daerah juga dirasa masih kurang optimal karena adanya kebijakan dimana penetapan target pendapatan tertentu mengacu pada target murni walaupun pada pertengahan tahun sudah terbukti tidak akan tercapai.

Demikian laporan ikhtisar eksekutif ini disusun untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi selanjutnya.

Cimahi, Januari 2019
**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**


DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720130 199003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan mengedepankan "Asas Akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tahun 2018 kepada Walikota Cimahi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2018. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dan Program/Kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016)
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 226), tanggal 18 Desember 2017;

16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 383), tanggal 18 Desember 2017.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan salah satu Badan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kota.

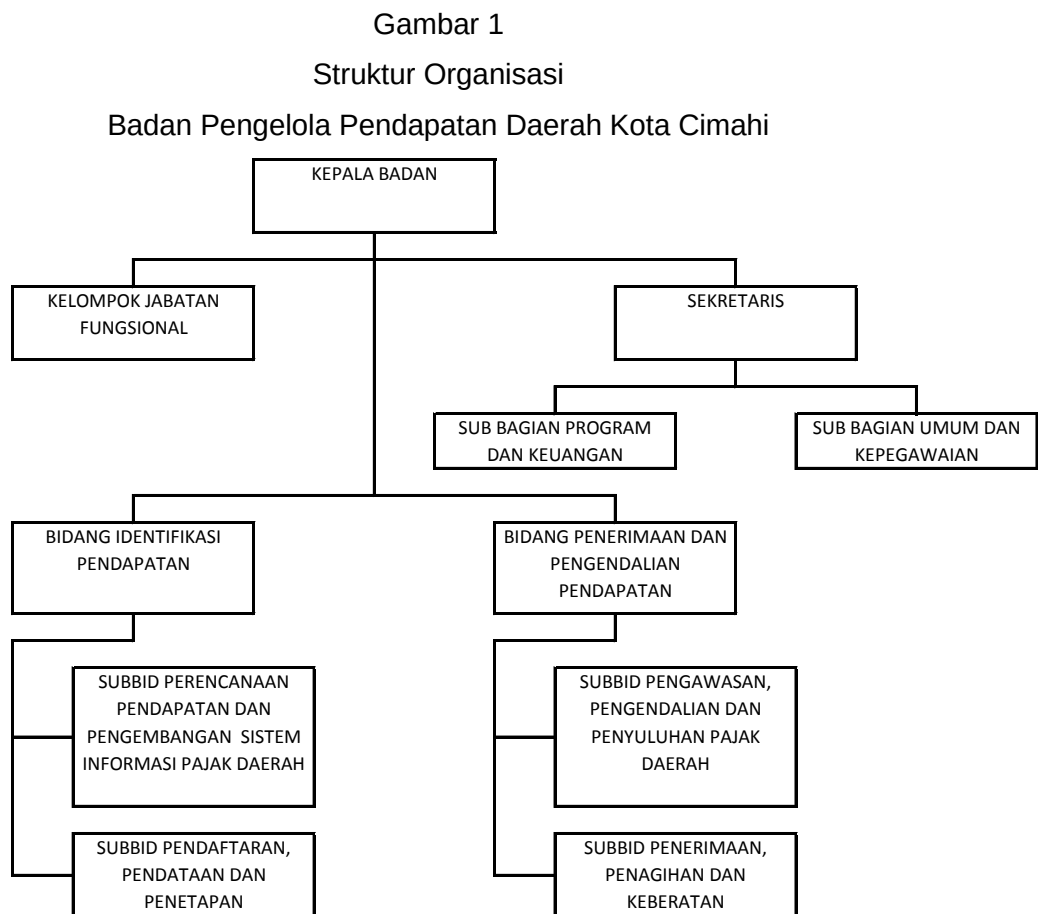
2. Fungsi Badan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka dibentuklah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah sebagaimana tergambar di bawah ini :



Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat Badan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3) Bidang Identifikasi Pendapatan, yang membawahi:
 - a. Subbid Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
 - b. Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- 4) Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, yang membawahi :
 - a. Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah
 - b. Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

1.4. Isu Strategis

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah dilaksanakan mulai 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan babak baru dalam

pembangunan dan pemerataan daerah. Otonomi daerah diyakini merupakan cara terbaik untuk mendorong pembangunan daerah dalam menggantikan sistem pembangunan terpusat yang dinilai kurang bisa mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan masing-masing daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik , pemerintah memiliki wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk menyelenggarakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita di suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.

Bantuan Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD.

Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukan mengeksplorasi pajak lokal secara lebih optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerah. Ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana perimbangan daripada PAD menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect*.

Flypaper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat Pemerintah Daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer berupa DAU dari pada menggunakan sumber dana kemampuan sendiri (Sukri dan Halim 2004; Maimunah 2006).

Tabel 1
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal
(Kemandirian Keuangan Daerah)

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Besar desentralisasi fiskal Kota Cimahi Tahun 2017 adalah 25,92% berarti kemandirian keuangan daerah Kota Cimahi memiliki predikat sedang dan seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa isu strategis Bappenda Kota Cimahi adalah **"Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi"**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Bappenda sebagai pembina dan pengawas Daerah mengemban visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Visi Wali Kota Cimahi yaitu :

“ Mewujudkan Cimahi Baru maju, Agamis dan Berbudaya”

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan Visi dijabarkan dalam misi Wali Kota Cimahi, dan misi yang harus dilaksanakan Bappenda Kota Cimahi ada pada Misi 2 yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik”

Melaksanakan visi dan misi Wali Kota Cimahi diwujudkan dalam visi misi Bappenda Kota Cimahi agar tujuan organisasi tercapai.

2.2. Visi Misi Bappenda Kota Cimahi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai Visi yaitu :

“PROFESIONAL DALAM PENGKOORDINASIAN PENDAPATAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”.

Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut sebagai upaya mengaktualisasikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2017-2022, sehingga diharapkan menjadi penggerak roda pembangunan dalam penggalian potensi sumber-sumber pendapatan yang mendukung mewujudkan pembangunan Kota Cimahi yang baru, maju, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berbudaya.

Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Dengan misi badan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan atau *stakeholders* dapat lebih mengenal Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Kota Cimahi, mengetahui dan memahami akan tugas pokok dan fungsi, program-program serta hasil yang akan dicapai di waktu-waktu yang akan datang. Adapun Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

- Pertama,** Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah;
- Kedua,** Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2.3. Arah Kebijakan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018

Seiring dengan RPJMD sebagai penentu tujuan RENSTRA Bappenda Kota Cimahi, maka tujuan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan organisasi meliputi :

1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perpajakan;
2. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan menyusun target yang akan dicapai;
3. Cetak masal dan Sosialisasi SPPT PBB;
4. Memutakhirkan data pajak yang ada;
5. Berkoordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan upaya pencapaian target;
6. Mengurangi penyimpangan pajak;
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat;
8. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.

2.4. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2018

Dalam Rencana Strategis 2017– 2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan (indikator kinerja utama) yang dijelaskan dalam tabel 2

Tabel 2
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
	Meningkatkan kemandirian/otonomi fiskal Kota Cimahi		
MISI I : Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah			
		Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya
		Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya
		Terpeliharanya sistem perpajakan	Jumlah modul
		Tersusunnya target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan
		Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan
		Terverifikasinya data wajib pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi
MISI II : Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah			
		Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah
		Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi
		Tersusunnya Raperda Pajak	Jumlah dokumen Raperda Pajak
		Terawasinya objek pajak	Jumlah objek pajak yang diperiksa
		Terbinanya wajib pajak	Jumlah WP yang diberi penyuluhan

2.5. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah menyusun Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Perkin ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2018. Perkin Bappenda

Kota Cimahi memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018. Matriks Perjanjian Kinerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018 dijelaskan dalam tabel 3

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	4,38%
2	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya	5%
3	Terpeliharanya sistem perpajakan	Jumlah modul	3 modul
4	Tersusunnya target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan	4 dokumen
5	Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 lembar
6	Terverifikasinya data wajib pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi	134.330 data
7	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah	90%
8	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75%
9	Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi	72 kali
10	Tersusunnya Raperda Pajak	Jumlah dokumen Raperda Pajak	1 dokumen
11	Terawasinya objek pajak	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1200 objek pajak
12	Terbinanya wajib pajak	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	475 orang

2.6. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2018 ini lebih menekankan pada bagaimana meningkatkan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah pada umumnya dan pajak daerah pada khususnya. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan BAPENDA Kota Cimahi, yaitu kegiatan belanja langsung dan kegiatan belanja tidak langsung. Adapun program yang dilaksanakan oleh BAPENDA Kota Cimahi terdiri dari 5 (Lima) program yaitu :

Tabel 4
Program dan Anggaran yang mendukung sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,124,495,899.88
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	815,605,000.00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68,114,500.00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	164,721,205.00
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,050,864,516.00
		5,223,801,120.88

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target Keuangan : 163.728.000

Indikator Kinerja : Terlaksananya kegiatan surat menyurat selama **12 bulan**

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Target Keuangan : 43.387.584

Indikator Kinerja : Lunasnya tagihan rekening 5 unit telepon, 1 jaringan listrik dan 1 jaringan internet untuk **12 bulan**

3) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Target Keuangan : 36.435.000

Indikator Kinerja : Terjaminnya asuransi **37 unit** kendaraan dinas

4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Target Keuangan : 136.169.100

Indikator Kinerja : Beroperasinya/terawatnya **37 unit** kendaraan dinas dan tertibnya perizinan **37 unit** kendaraan dinas

5) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Target Keuangan : 29.837.950

Indikator Kinerja : Terkelolanya sistem dan tersedianya data keuangan selama **12 bulan**

6) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Target Keuangan : 68.065.200

Indikator Kinerja : Tersedianya jasa kebersihan selama **12**

bulan

- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target Keuangan : 166.909.476
Indikator Kinerja : Tersedianya **95 Jenis** Alat Tulis Kantor
 - 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Target Keuangan : 155.730.250
Indikator Kinerja : Tersedianya **100.000 lembar** penggandaan dan barang cetakan
 - 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Target Keuangan : 12.046.000
Indikator Kinerja : Tersedianya **12 Jenis** alat listrik
 - 10) Penyediaan peralatan rumah tangga
Target Keuangan : 4.050.000
Indikator Kinerja : Tersedianya **12 Jenis** peralatan rumah tangga
 - 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Target Keuangan : 9.310.000
Indikator Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan selama **12 bulan**
 - 12) Penyediaan bahan logistik kantor
Target Keuangan : 16.903.340
Indikator Kinerja : Tersedianya kebutuhan logistik kantor selama **12 bulan**
 - 13) Penyediaan makanan dan minuman
Target Keuangan : 40.600.000
Indikator Kinerja : Tersedianya makanan dan minuman untuk **20 kali** rapat dan **11 kali** kunjungan tamu
 - 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Target Keuangan : 241.324.000
Indikator Kinerja : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk **44 orang**
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Target Keuangan : 338.500.000
Indikator Kinerja : Tersedianya **10 jenis** sarana dan prasarana administrasi perkantoran

- 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Target Keuangan : 343.255.000
 - Indikator Kinerja : Terpenuhinya BBM dan pelumas kendaraan dinas untuk **12 bulan**
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
 - Target Keuangan : 133.850.000
 - Indikator Kinerja : Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama **12 bulan**
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - Target Keuangan : 27.500.000
 - Indikator Kinerja : Terasilinasinya **44 orang** pegawai untuk mengikuti Bintek
 - 2) Pembinaan Pegawai
 - Target Keuangan : 40.614.500
 - Indikator Kinerja : Terselenggaranya pembinaan **77 orang** pegawai
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Target Keuangan : 118.213.255
 - Indikator Kinerja : Tersusunnya **22 Dokumen** Pelaporan Capaian Kinerja
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - Target Keuangan : 22.447.950
 - Indikator Kinerja : Tersusunnya **2 Dokumen** Laporan Keuangan Semesteran
 - 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - Target Keuangan : 24.060.000
 - Indikator Kinerja : Tersusunnya **1 Dokumen** Laporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah
 - 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
 - Target Keuangan : 107.335.000
 - Indikator Kinerja : Tersusunnya **1 draft** revisi Peraturan Walikota

Cimahi tentang Pajak Daerah

2) Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

- Target Keuangan : 518.633.800
- Indikator Kinerja : a. Tercetaknya dan terdistribusinya **150.000 lembar SPPT PBB**
- b. Terlaksananya **1 kali kegiatan** launching dan sosialisasi distribusi SPPT
- c. **1 kali** persiapan sertifikasi ISO

3) Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Target Keuangan : 313.923.400
- Indikator Kinerja : Terlaksananya pembinaan dalam upaya peningkatan pemahaman tentang tata cara pemungutan pajak daerah self assesment dengan **475 WP**

4) Peningkatan Kepatuhan Perpajakan

- Target Keuangan : 372.665.816
- Indikator Kinerja : Patuhnya **75%** dari jumlah WP untuk membayar pajak

5) Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

- Target Keuangan : 280.127.000
- Indikator Kinerja : Terawasinya/terperiksanya **1200 Objek Pajak** terhadap pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Kontribusi Secara Tepat Waktu

6) Verifikasi Data Wajib Pajak

- Target Keuangan : 490.942.100
- Indikator Kinerja : Terverifikasinya/tervalidasinya **134.330 data** Wajib Pajak

7) Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

- Target Keuangan : 301.734.900
- Indikator Kinerja : a. Terselenggaranya **60 kali pelayanan** Pajak melalui Mobil Keliling
- b. Terselenggaranya **12 kali** rekonsiliasi pendapatan dengan Dinas Penghasil

8) Penyusunan Target Pendapatan

- Target Keuangan : 170.797.200
- Indikator Kinerja : a. 2 dokumen target pendapatan

perubahan 2018 dan murni 2019

- b. 2 dokumen penyusunan target pendapatan 2019 dan perubahan 2018

9) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah

Target Keuangan : 494.705.300

Indikator Kinerja : Terpeliharanya/terupdatenya dan tersusunnya **3 modul** sistem aplikasi Pajak Daerah

2.7. Hasil Evaluasi LKIP Bappenda Tahun 2017

Hasil Evaluasi LKIP Bappenda oleh Inspektorat Tahun 2017, diperoleh nilai 62,83 dengan predikat B. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel 5

Tabel 5				
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Bappenda Tahun 2017				
No	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nila	Persen (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	21.97	73.23%
	1) Perencanaan Strategis	10	7.87	78.70%
	2) Perencanaan Kinerja Tahunan	20	14.10	70.50%
2	Pengukuran Kinerja	25	17.19	68.76%
	1) Pemenuhan Pengukuran	5	3.75	75.00%
	2) Kualitas Pengukuran	12.5	9.69	77.52%
	3) Implementasi Pengukuran	7.5	3.75	50.00%
3	Pelaporan Kinerja	15	5.71	38.07%
	1) Pemenuhan Pelaporan	3	1.50	50.00%
	2) Penyajian Informasi Kinerja	7.5	2.41	32.13%
	3) Pemanfaatan Informasi Kinerja	4.5	1.80	40.00%
4	Evaluasi Internal	10	4.26	42.60%
	1) Pemenuhan Evaluasi	2	1.25	62.50%
	2) Kualitas Evaluasi	5	1.88	37.60%
	3) Pemanfaatan Evaluasi	3	1.13	37.67%
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	13.7	68.50%
	1) Kinerja yang dilaporkan(output)	7.5	5.50	73.33%
	2) Kinerja yang Dilaporkan (outcome)	12.5	8.20	65.60%

Rekomendasi perbaikan kinerja Bappenda adalah :

1. Perbaikan pengukuran Kinerja dalam hal implementasi pengukuran
2. Perbaikan Pelaporan Kinerja dalam hal pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja
3. Perbaikan evaluasi internal dalam hal kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi
4. Untuk sisa komponen pengukuran lainnya dapat ditingkatkan lagi

B A B I I I
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Bappenda

Pengukuran kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Tabel 6 menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappenda.

Tabel 6
Capaian Kinerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	4.38%	-12.74%	-290.94%
2	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya	5%	-18.52%	-370.33%
3	Terpeliharanya sistem perpajakan	Jumlah modul	3 modul	3 modul	100.00%
4	Tersusunnya target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	100.00%
5	Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 lembar	150.000 lembar	100.00%
6	Terverifikasinya data wajib pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi	134.330 data	138.786 data	103.32%
7	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah	90%	96.89%	107.66%
8	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75%	99.08%	132.11%
9	Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi	72 kali	71 kali	98.61%
10	Tersusunnya Raperda Pajak	Jumlah dokumen Raperda Pajak	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
11	Terawasinya objek pajak	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1200 objek pajak	1192 objek pajak	99.33%
12	Terbinanya wajib pajak	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	475 orang	875 orang	184.21%

Tabel 7
Capaian Kinerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018 Dengan Target RENSTRA 2018-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	17.63%	-12.74%	-72.28%
2	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya	7%	-18.52%	-264.52%
3	Terpeliharanya sistem perpajakan	Jumlah modul	3 modul	3 modul	100.00%
4	Tersusunnya target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	100.00%
5	Optimalnya penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	182.326 lembar	150.000 lembar	82.27%
6	Terverifikasinya data wajib pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi	134.330 data	138.786 data	103.32%
7	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah	92%	96.89%	105.32%
8	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75%	99.08%	132.11%
9	Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi	72 kali	71 kali	98.61%
10	Tersusunnya Raperda Pajak	Jumlah dokumen Raperda Pajak	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
11	Terawasinya objek pajak	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1200 objek pajak	1192 objek pajak	99.33%
12	Terbinanya wajib pajak	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	575 orang	875 orang	152.17%

Dasar penghitungan capaian target indikator kinerja sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Eselon II dan III Bappenda Kota Cimahi adalah penghitungan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cimahi berikut ini :

Tabel 8
Peningkatan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Capaian Peningkatan Realisasi
Pendapatan asli daerah	383,911,991,301.88	334,988,775,127.39	-12.74%
Pajak daerah	165,391,683,082.00	134,766,830,583.00	-18.52%
Retribusi daerah	10,239,610,285.00	12,196,475,827.00	19.11%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9,256,000,000.00	9,391,200,000.00	1.46%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	199,024,697,934.88	178,634,268,717.39	-10.25%
Dana perimbangan	820,783,188,232.00	788,025,064,842.00	-3.99%
Dana bagi hasil pajak	51,007,404,828.00	42,838,707,468.00	-16.01%
Dana bagi hasil bukan pajak	26,593,543,094.00	23,969,468,586.00	-9.87%
Dana alokasi umum	576,278,051,000.00	576,278,051,000.00	0.00%
Dana alokasi khusus	166,904,189,310.00	144,938,837,788.00	-13.16%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	276,952,714,446.00	193,158,004,210.00	-30.26%
Dana otonomi khusus			
Dana Penyesuaian			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	117,325,163,171.00	128,044,295,494.00	9.14%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	2,488,000,000.00	50,446,560,000.00	1927.59%
Dana Insentif Daerah	55,382,603,000.00	4,500,000,000.00	-91.87%
Dana BOS	50,871,020,275.00		-100.00%
Bantuan dari Provinsi	50,885,928,000.00	10,167,148,716.00	-80.02%
	1,481,647,893,979.88	1,316,171,844,179.39	-11.17%

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program dan Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Akhir Tahun 2018 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Bappenda Kota Cimahi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Target Keuangan : 163.728.000
 - Realisasi : 150.804.000 atau 92,11%
 - Target Fisik : Terlaksananya kegiatan surat menyurat selama **12 bulan**
 - Realisasi : 12 bulan
 - Pencapaian Realisasi Fisik : 100%
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - Target Keuangan : 43.387.584
 - Realisasi : 29.827.598 atau 68,75
 - Target Fisik : Lunasnya tagihan rekening 5 unit telepon, 1 jaringan listrik dan 1 jaringan internet untuk **12 bulan**
 - Realisasi : 12 bulan
 - Pencapaian Realisasi Fisik : 100%
 - 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - Target Keuangan : 36.435.000
 - Realisasi : 36.435.000 atau 100,00
 - Target Fisik : Terjaminnya asuransi **37 unit** kendaraan dinas
 - Realisasi : 37 unit
 - Pencapaian Realisasi Fisik : 100%
 - 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Target Keuangan : 136.169.100
 - Realisasi : 112.818.480 atau 82,85%
 - Target Fisik : Beroperasinya/terawatnya **37 unit** kendaraan dinas dan tertibnya perizinan **37 unit** kendaraan dinas
 - Realisasi : 74 unit
 - Pencapaian Realisasi Fisik : 100%

- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Target Keuangan	:	29.837.950
Realisasi	:	28.512.500 atau 95,56
Target Fisik	:	Terkelolanya sistem dan tersedianya data keuangan selama 12 bulan
Realisasi	:	12 bulan
Pencapaian Realisasi Fisik	:	100%
- 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target Keuangan	:	68.065.200
Realisasi	:	62.770.200 atau 92,22
Target Fisik	:	Tersedianya jasa kebersihan selama 12 bulan
Realisasi	:	12 bulan
Pencapaian Realisasi Fisik	:	100,00%
- 7) Penyediaan ATK

Target Keuangan	:	166.909.476
Realisasi	:	158.981.000 atau 95,25%
Target Fisik	:	Tersedianya 95 Jenis Alat Tulis Kantor
Realisasi	:	97 jenis
Pencapaian Realisasi Fisik	:	102,11%%
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Target Keuangan	:	155.730.250
Realisasi	:	140.476.008 atau 90,20
Target Fisik	:	Tersedianya 100.000 lembar penggandaan dan barang cetakan
Realisasi	:	94.400 lembar
Pencapaian Realisasi Fisik	:	94,40%
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Target Keuangan	:	12.046.000
Realisasi	:	11.916.000 atau 98,92
Target Fisik	:	Tersedianya 12 Jenis alat listrik
Realisasi	:	12 Jenis
Pencapaian Realisasi Fisik	:	100%
- 10) Penyediaan peralatan rumah tangga

Target Keuangan	:	4.050.000
Realisasi	:	4.050.000 atau 100,00%

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Fisik | : | Tersedianya 12 Jenis peralatan rumah tangga |
| Realisasi | : | 12 jenis |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 9.310.000 |
| Realisasi | : | 9.295.000 atau 99,84% |
| Target Fisik | : | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan selama 12 bulan |
| Realisasi | : | 12 bulan |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
- 12) Penyediaan bahan logistik kantor.
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 16.903.340 |
| Realisasi | : | 14.894.840 atau 88,12% |
| Target Fisik | : | Tersedianya kebutuhan logistik kantor selama 12 bulan |
| Realisasi | : | 12 bulan |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
- 13) Penyediaan makanan dan minuman
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 40.600.000 |
| Realisasi | : | 36.960.000 atau 91,03% |
| Target Fisik | : | Tersedianya makanan dan minuman untuk 20 kali rapat dan 11 kali kunjungan tamu |
| Realisasi | : | 41 kali |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 124,24% |
- 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Target Keuangan | : | 241.324.000 |
| Realisasi | : | 241.085.235 atau 99,90% |
| Target Fisik | : | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 44 orang |
| Realisasi | : | 50 orang |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 113,64% |
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- | | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Target Keuangan | : | 338.500.000 |
| Realisasi | : | 295.163.908 atau 87,20% |

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Target Fisik | : | Tersedianya 10 jenis sarana dan prasarana administrasi perkantoran |
| Realisasi | : | 8 jenis |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 80% |
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 343.255.000 |
| Realisasi | : | 292.840.000 atau 85,31% |
| Target Fisik | : | Terpenuhinya BBM dan pelumas kendaraan dinas untuk 12 bulan |
| Realisasi | : | 12 bulan |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 133.850.000 |
| Realisasi | : | 106.586.500 atau 79,63% |
| Target Fisik | : | Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan |
| Realisasi | : | 12 bulan |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Target Keuangan | : | 27.500.000 |
| Realisasi | : | 24.750.000 atau 90% |
| Target Fisik | : | Terfasilitasinya 44 orang pegawai untuk mengikuti Bintek |
| Realisasi | : | 20 orang |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 45,45% |
- 2) Pembinaan Pegawai
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 40.614.500 |
| Realisasi | : | 40.614.500 atau 100,00% |
| Target Fisik | : | Terselenggaranya pembinaan 77 orang pegawai |
| Realisasi | : | 77 orang |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 118.213.255 |
| Realisasi | : | 109.989.850 atau 93,04% |
| Target Fisik | : | Tersusunnya 22 Dokumen
Pelaporan Capaian Kinerja |
| Realisasi | : | 22 Dokumen |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Target Keuangan | : | 22.447.950 |
| Realisasi | : | 36.867.000 atau 98,81% |
| Target Fisik | : | Tersusunnya 2 Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran |
| Realisasi | : | 2 Dokumen |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
- 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 24.060.000 |
| Realisasi | : | 21.730.000 atau 90,32% |
| Target Fisik | : | Tersusunnya 1 Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun |
| Realisasi | : | 1 Dokumen |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 107.335.000 |
| Realisasi | : | 102.782.000 atau 95,76% |
| Target Fisik | : | Tersusunnya 1 draft revisi
Peraturan Walikota Cimahi tentang
Pajak Daerah |
| Realisasi | : | 1 draft |
| Pencapaian Realisasi Fisik | : | 100% |
- 2) Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Target Keuangan | : | 518.633.800 |
| Realisasi | : | 477.227.850 atau 92,02% |
| Target Fisik | : | a. Tercetaknya dan
terdistribusinya 150.000
lembar SPPT PBB
b. Terlaksananya 1 kali kegiatan |

		launching dan sosialisasi distribusi SPPT
		c. 1 kali persiapan sertifikasi ISO
Realisasi	:	a. 150.000 lembar
		b. 1 kali
		c. 1 kali
Pencapaian Realisasi Fisik	:	100%
3) Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Target Keuangan	:	313.923.400
Realisasi	:	223.176.680 atau 88,71%
Target Fisik	:	Terlaksananya pembinaan dalam upaya peningkatan pemahaman tentang tata cara pemungutan pajak daerah self assesment kepada 475 WP
Realisasi	:	875 WP
Pencapaian Realisasi Fisik	:	184,21%
4) Peningkatan Kepatuhan Perpajakan		
Target Keuangan	:	372.665.816
Realisasi	:	350.434.800 atau 94,03%
Target Fisik	:	Patuhnya 75% dari jumlah WP untuk membayar pajak
Realisasi	:	99,08%
Pencapaian Realisasi Fisik	:	132,11%
5) Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
Target Keuangan	:	280.127.000
Realisasi	:	267.165.000 atau 95,37%
Target Fisik	:	Terawasinya/terperiksanya 1200 Objek Pajak terhadap pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Kontribusi Secara Tepat Waktu
Realisasi	:	1192 objek pajak
Pencapaian Realisasi Fisik	:	99,33%
6) Verifikasi Data Wajib Pajak		
Target Keuangan	:	490.942.100
Realisasi	:	449.171.847 atau 91,49%

Target Fisik	:	Terverifikasinya/tervalidasinya 134.330 data Wajib Pajak
Realisasi	:	138.786 data
Pencapaian Realisasi Fisik	:	103,32%
7) Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah		
Target Keuangan	:	301.734.900
Realisasi	:	286.725.250 atau 95,03%
Target Fisik	:	a. Terselenggaranya 60 kali pelayanan Pajak melalui Mobil Keliling b. Terselenggaranya 12 kali rekonsiliasi pendapatan dengan Dinas Penghasil
Realisasi	:	a. 59 kali b. 12 kali
Pencapaian Realisasi Fisik	:	98,61%
8) Penyusunan Target Pendapatan		
Target Keuangan	:	170.797.200
Realisasi	:	157.105.996 atau 91,96%
Target Fisik	:	a. 2 dokumen kajian target pendapatan perubahan 2018 dan murni 2019 b. 2 dokumen target pendapatan 2019 dan perubahan 2018
Realisasi	:	a. 2 dokumen b. 2 dokumen
Pencapaian Realisasi Fisik	:	100%
9) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah		
Target Keuangan	:	494.705.300
Realisasi	:	475.005.400 atau 96,02%
Target Fisik	:	Terpeliharanya/terupdatenya dan tersusunnya 3 modul sistem aplikasi Pajak Daerah
Realisasi	:	3 modul
Pencapaian Realisasi Fisik	:	100%

3.3 Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya yang sah, dana perimbangan pajak dan bukan pajak dan pendapatan lain-lain. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah selain mengelola anggaran pendapatan Bappenda juga sebagai koordinator seluruh pendapatan Kota Cimahi. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Akhir Tahun 2018 sebesar Rp. 1.316.171.844.179,39 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Pendapatan asli daerah	326,842,694,183.93	334,988,775,127.39	102.49%
Pajak daerah	132,108,046,123.69	134,766,830,583.00	102.01%
Retribusi daerah	13,042,067,600.00	12,196,475,827.00	93.52%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9,391,200,000.00	9,391,200,000.00	100.00%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	172,301,380,460.24	178,634,268,717.39	103.68%
Dana perimbangan	831,437,840,000.00	788,025,064,842.00	94.78%
Dana bagi hasil pajak	77,508,746,000.00	42,838,707,468.00	55.27%
Dana bagi hasil bukan pajak	20,180,539,000.00	23,969,468,586.00	118.78%
Dana alokasi umum	576,278,051,000.00	576,278,051,000.00	100.00%
Dana alokasi khusus	157,470,504,000.00	144,938,837,788.00	92.04%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	200,106,854,851.00	193,158,004,210.00	96.53%
Dana otonomi khusus			
Dana Penyesuaian			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	130,325,338,651.00	128,044,295,494.00	98.25%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	48,584,600,000.00	50,446,560,000.00	103.83%
Dana Insentif Daerah	9,000,000,000.00	4,500,000,000.00	50.00%
Dana BOS			
Bantuan dari Provinsi	12,196,916,200.00	10,167,148,716.00	83.36%
	1,358,387,389,034.93	1,316,171,844,179.39	96.89%

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah SKPD Penghasil Tahun 2018

Secara khusus realisasi pendapatan dari masing-masing SKPD Penghasil sebagai berikut :

1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tabel 10
Target dan Realisasi Pendapatan Bappenda Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	400,203,358,434.93	372,643,115,806.39	93.11%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	150,991,818,583.93	160,931,495,542.39	106.61%
Hasil Pajak Daerah	132,108,046,123.69	134,766,830,583.00	102.01%
Pajak Hotel	602,818,566.00	633,576,612.00	105.10%
Pajak Restoran	11,787,020,400.00	13,146,238,274.00	111.53%
Pajak Hiburan	756,603,100.00	735,783,567.00	97.25%
Pajak Reklame	2,844,167,550.00	2,727,190,144.00	95.89%
Pajak Penerangan Jalan	41,137,077,750.00	41,923,983,395.00	101.91%
Pajak Parkir	754,397,350.00	797,591,960.00	105.73%
Pajak Air Tanah	4,346,272,600.00	5,350,877,694.00	123.11%
Pajak BPHTB	31,777,841,903.69	29,589,798,738.00	93.11%
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	38,101,846,904.00	39,861,790,199.00	104.62%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,391,200,000.00	9,391,200,000.00	100.00%
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9,391,200,000.00	9,391,200,000.00	100.00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,492,572,460.24	16,773,464,959.39	177.36%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	150,000,000.00	122,506,500.00	81.67%
Penerimaan Jasa Giro	6,445,275,696.00	11,501,710,662.17	178.45%
Rekening Deposito	369,452,055.00	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	110,459,167.00	143,685,000.00	130.08%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8,180,913.00	654,490,144.00	8000.21%
Pendapatan Denda Pajak	807,607,320.00	1,833,261,170.00	227.00%
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	1,000,000,000.00	1,926,220,254.00	192.62%
Sumbangan Pihak Ketiga	320,021,136.00	328,021,658.00	102.50%
Pendapatan Bunga Lain-lain	246,076,173.24	263,569,571.22	107.11%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	35,500,000.00	-	-
DANA PERIMBANGAN	97,689,285,000.00	66,808,176,054.00	68.39%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	97,689,285,000.00	66,808,176,054.00	68.39%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151,522,254,851.00	144,903,444,210.00	96.53%
Pendapatan Hibah	-	2,192,000,000.00	103.83%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	130,325,338,651.00	128,044,295,494.00	98.25%
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	12,196,916,200.00	10,167,148,716.00	83.36%
Dana Insentif Daerah	9,000,000,000.00	4,500,000,000.00	50.00%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp. 372.643.115.806,39 atau 93,11% dari target 2018.

2) Dinas Kesehatan

Tabel 11
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	24,664,720,050.00	18,728,398,850.00	75.93%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	24,664,720,050.00	18,728,398,850.00	75.93%
Hasil Retribusi Daerah	1,855,912,050.00	1,961,727,500.00	105.70%
		-	
Retribusi Jasa Umum	1,855,912,050.00	1,961,727,500.00	105.70%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,855,912,050.00	1,961,727,500.00	105.70%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22,808,808,000.00	16,766,671,350.00	73.51%
		-	
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22,529,808,000.00	16,588,116,350.00	73.63%
Dana Non Kapitasi	279,000,000.00	178,555,000.00	64.00%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp. 18.728.398.850,00 atau 75,93% dari target 2018.

3) Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 12
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	3,267,192,000.00	1,693,793,440.00	51.84%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	3,267,192,000.00	1,693,793,440.00	51.84%
Hasil Retribusi Daerah	3,267,192,000.00	1,693,793,440.00	51.84%
		-	
Retribusi Jasa Umum	1,266,210,000.00	1,555,102,940.00	122.82%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1,266,210,000.00	1,555,102,940.00	122.82%
		-	
Retribusi Jasa Usaha	2,000,982,000.00	138,690,500.00	6.93%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,000,982,000.00	138,690,500.00	6.93%
laboratorium lingkungan	2,000,982,000.00	138,690,500.00	6.93%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.693.793.440,00 atau 51,84 % dari target 2018.

4) DPKP

Tabel 13
Target dan Realisasi Pendapatan DPKP Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	3,078,320,800.00	3,810,051,368.00	123.77%
Pendapatan Asli Daerah	3,078,320,800.00	3,810,051,368.00	123.77%
Hasil Retribusi Daerah	3,078,320,800.00	3,758,577,000.00	122.10%
		-	
Retribusi Jasa Umum	167,914,000.00	146,232,500.00	87.09%
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	88,950,000.00	93,322,500.00	104.92%
Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus	41,650,000.00	52,910,000.00	127.03%
Pengelolaan Limbah Cair	37,314,000.00	-	-
Retribusi Jasa Usaha	2,910,406,800.00	3,612,344,500.00	124.12%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,246,220,000.00	2,647,633,500.00	117.87%
Rumah Susun Sewa	2,246,220,000.00	2,647,633,500.00	117.87%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	664,186,800.00	964,711,000.00	145.25%
- Pemakaian Air Minum	664,186,800.00	964,711,000.00	145.25%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		51,474,368.00	
		-	
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha		51,474,368.00	
Pendapatan Denda Retribusi Rusunawa		25,109,368.00	
Pendapatan Denda Retribusi Air Minum		26,365,000.00	

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola DPKP sebesar Rp. 3.810.051.368,00 atau 123,77 % dari target 2018.

5) Dinas Perhubungan

Tabel 14
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	1,619,849,000.00	1,681,278,420.00	103.79%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	1,619,849,000.00	1,681,278,420.00	103.79%
Hasil Retribusi Daerah	1,619,849,000.00	1,681,278,420.00	103.79%
		-	
Retribusi Jasa Umum	1,468,329,000.00	1,541,079,420.00	104.95%
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	841,800,000.00	834,585,000.00	99.14%
		-	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	626,529,000.00	706,494,420.00	112.76%
Retribusi Jasa Usaha	120,020,000.00	126,399,000.00	105.31%
		-	
Retribusi Terminal	120,020,000.00	126,399,000.00	105.31%
Retribusi Perizinan Tertentu	31,500,000.00	13,800,000.00	43.81%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp. 1.681.278.420,00 atau 103,79% dari target 2018.

6) Disnaker

URAIAN PENDAPATAN	TARGET TAHUN 2018	S/D BULAN INI	%
PENDAPATAN DAERAH	1,000,000,000.00	-	0.00%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	1,000,000,000.00	-	0.00%
Hasil Retribusi Daerah	1,000,000,000.00	-	0.00%
Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan	1,000,000,000.00	-	0.00%
Retribusi Perpanjangan IMTA	1,000,000,000.00		0.00%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari target 2018.

7) Disdagkoperin

Tabel 15
Target dan Realisasi Pendapatan Disdagkoperin Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	549,537,500.00	835,035,500.00	151.95%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	549,537,500.00	835,035,500.00	151.95%
Hasil Retribusi Daerah	549,537,500.00	705,034,280.00	128.30%
		-	
Retribusi Jasa Umum	399,537,500.00	426,078,100.00	106.64%
		-	
Retribusi Jasa Usaha	150,000,000.00	278,956,180.00	185.97%
		-	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	130,001,220.00	8666.75%
		-	
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	3,398,220.00	226.55%
Hasil Penyewaan Aset Daerah	0.00	126,603,000.00	

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Disdagkoperin sebesar Rp. 835.035.500,00 atau 151,95% dari target 2018.

8) Satpol PP dan Damkar

Tabel 16
Target dan Realisasi Pendapatan Satpol PP dan Damkar Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	20,000,000.00	44,947,000.00	224.74%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	20,000,000.00	44,947,000.00	224.74%
Hasil Retribusi Daerah	20,000,000.00	44,947,000.00	224.74%
		-	
Retribusi Jasa Umum	20,000,000.00	44,947,000.00	224.74%
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	20,000,000.00	44,947,000.00	224.74%
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	20,000,000.00	44,947,000.00	224.74%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola Satpol PP dan Damkar sebesar Rp. 44.947.000,00 atau 224,74% dari target 2018.

9) Dispangtan

Tabel 17
Target dan Realisasi Pendapatan Dispangtan Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	S/D BULAN INI	%
PENDAPATAN DAERAH	170,100,000.00	190,150,000.00	111.79%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	170,100,000.00	190,150,000.00	111.79%
Hasil Retribusi Daerah	170,100,000.00	190,150,000.00	111.79%
		-	
Retribusi Jasa Usaha	170,100,000.00	190,150,000.00	111.79%
		-	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	130,000,000.00	157,310,000.00	121.01%
Retribusi Pengobatan Hewan	130,000,000.00	157,310,000.00	121.01%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40,100,000.00	32,840,000.00	81.90%
- Balai Benih Ikan Air Tawar	40,100,000.00	32,840,000.00	81.90%

Realisasi pendapatan daerah dari Dispangtan sebesar Rp. 190.150.000,00 atau 111,79% dari target 2018.

10) DPMPTSP

Tabel 18
Target dan Realisasi Pendapatan DPMPTSP Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	1,481,156,250.00	2,160,968,187.00	145.90%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	1,481,156,250.00	2,160,968,187.00	145.90%
Hasil Retribusi Daerah	1,481,156,250.00	2,160,968,187.00	145.90%
		-	
Retribusi Perizinan Tertentu	1,481,156,250.00	2,160,968,187.00	145.90%
		-	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,481,156,250.00	2,160,968,187.00	145.90%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola DPMPTSP sebesar Rp. 2.160.968.187,00 atau 145,90% dari target 2018.

11) RSUD Cibabat

Tabel 19
Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Cibabat Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	140,000,000,000.00	144,912,656,820.00	103.51%
		-	
Pendapatan Asli Daerah	140,000,000,000.00	144,912,656,820.00	103.51%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140,000,000,000.00	144,912,656,820.00	103.51%
		-	
Pendapatan dari badan layanan umum daerah	140,000,000,000.00	144,912,656,820.00	103.51%
Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	140,000,000,000.00	144,912,656,820.00	103.51%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola RSUD Cibabat sebesar Rp. 144.912.656.820,00 atau 103,51% dari target 2018.

12) BPKAD

Tabel 20
Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENDAPATAN DAERAH	782,333,155,000.00	769,471,448,788.00	98.36%
		-	
Dana Perimbangan	733,748,555,000.00	721,216,888,788.00	98.29%
Dana Alokasi Umum	576,278,051,000.00	576,278,051,000.00	100.00%
Dana Alokasi Umum	576,278,051,000.00	576,278,051,000.00	100.00%
		-	
Dana Alokasi Khusus	157,470,504,000.00	144,938,837,788.00	92.04%
Dana alokasi khusus Fisik	48,636,487,000.00	44,132,924,385.00	90.74%
Dana alokasi khusus Non Fisik	108,834,017,000.00	100,805,913,403.00	92.62%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48,584,600,000.00	48,254,560,000.00	99.32%
Pendapatan Hibah	48,584,600,000.00	48,254,560,000.00	99.32%
Pemerintah (BOS)	48,584,600,000.00	48,254,560,000.00	99.32%

Realisasi pendapatan daerah yang dikelola BPKAD sebesar Rp. 769.471.448.788,00 atau 98,36% dari target 2018.

3. Target dan Realisasi Belanja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018

Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Target dan Realisasi Belanja Bappenda Tahun 2018				
No.	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	BELANJA	14,087,941,120.88	13,038,252,383.00	92.55%
I.	Belanja Tidak Langsung	8,864,140,000.00	8,224,483,361.00	92.78%
	Belanja Pegawai	8,864,140,000.00	8,224,483,361.00	92.78%
II.	Belanja Langsung	5,223,801,120.88	4,813,769,022.00	92.15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,124,495,899.88	1,038,825,861.00	92.38
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang & Jasa	1,124,495,899.88	1,038,825,861.00	92.38
	Belanja Modal			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	815,605,000.00	694,590,408.00	85.16
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang & Jasa	540,105,000.00	454,293,500.00	84.11
	Belanja Modal	275,500,000.00	240,296,908.00	87.22
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68,114,500.00	65,364,500.00	95.96
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang & Jasa	68,114,500.00	65,364,500.00	95.96
	Belanja Modal			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	164,721,205.00	150,987,475.00	91.66
	Belanja Pegawai	66,951,000.00	59,012,000.00	88.14
	Belanja Barang & Jasa	97,770,205.00	91,975,475.00	94.07
	Belanja Modal			
5	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	3,050,864,516.00	2,864,000,778.00	93.88
	Belanja Pegawai	79,834,000	69,758,000	87.38
	Belanja Barang & Jasa	2,971,030,516	2,794,242,778	94.05
	Belanja Modal			

3.4. Analisis Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan suatu organisasi perlu diukur dalam suatu ukuran analisis antara pendapatan dan belanja. Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 22
Analisis Efisiensi

No.	Uraian	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1)	PENDAPATAN			
(1)	Pendapatan Asli Daerah	150,991,818,583.93	160,931,495,542.39	106.58
(2)	Dana Perimbangan	97,689,285,000.00	66,808,176,054.00	68.39
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	151,522,254,851.00	144,903,444,210.00	95.63
	Jumlah 1	400,203,358,434.93	372,643,115,806.39	93.11
2)	BELANJA			
(1)	Belanja Tidak Langsung	8,864,140,000.00	8,224,483,361.00	92.78
(2)	Belanja Langsung	5,223,801,120.88	4,813,769,022.00	92.15
	Jumlah 2	14,087,941,120.88	13,038,252,383.00	92.55
	Surplus/defisit	386,115,417,314.05	359,604,863,423.39	93.13

Persentase pencapaian pendapatan yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sampai dengan akhir Tahun 2018 dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 106,58 %, Dana Perimbangan 68,39 %. dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 95,63 %. Persentase pencapaian belanja dari Belanja Tidak Langsung sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar 92,78 % dan Belanja Langsung sebesar 92,15 %.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian target pendapatan daerah secara total sudah cukup baik yaitu 93,11%. Untuk realisasi belanja BAPENDA secara total mencapai 92,55% juga sudah cukup baik.

3.5. Analisis Kemandirian Daerah

Perkembangan kemandirian daerah Kota Cimahi setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 23
Analisis Kemandirian Daerah

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN	REALISASI PAD	RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN	TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH
2015	1.186.804.131.668,44	268.816.074.332,44	22,65 %	SEDANG
2016	1.218.994.660.218,34	286.049.615.484,34	23,47 %	SEDANG
2017	1.430.817.652.754,88	383.952.770.351,88	25,91 %	SEDANG
2018	1.316.171.844.179,39	334.988.775.127,39	25,45%	SEDANG

Tabel diatas menunjukan bahwa kemandirian daerah Kota Cimahi semakin meningkat setiap tahunnya tapi menurun di Tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan PAD yaitu pada kode rekening Pajak Daerah BPHTB, Lain-Lain PAD yang Sah dari Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan dari BLUD.

Penurunan BPHTB di Tahun 2018 terjadi karena pada Tahun 2017 terjadi anomali (sertifikasi massal dan batas akhir pembayaran Tax Amnesty) sehingga BPHTB tahun 2017 meningkat tajam diluar perhitungan. Di satu sisi peningkatan ini memang menguntungkan keuangan Kota Cimahi Tahun 2017, namun di sisi lain saat mengukur peningkatan PAD Tahun 2018 terjadi penurunan sehingga seakan-akan Tahun 2018 kinerja Bappenda meningkatkan PAD dinilai buruk. Padahal bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 maka BPHTB Tahun 2018 sudah meningkat.

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan di Tahun 2018 menurun dibandingkan Tahun 2017 karena Tahun 2017 ada pekerjaan konstruksi pasar atas yang tidak selesai sehingga jaminannya dicairkan untuk Pemerintah Kota Cimahi sedangkan di Tahun 2018 tidak ada pekerjaan pihak ketiga yang tidak selesai. Pendapatan dari Pengembalian tidak bisa diprediksi karena untuk menampung kelebihan bayar dari hasil temuan BPK atau Inspektorat. Pendapatan dari BLUD berkurang karena piutang BPJS sampai dengan saat ini mencapai lebih dari 30 Milyar.

Semua faktor penyebab diatas menunjukan bahwa ada keadaan diluar kendali Bappenda yang dapat mempengaruhi tingkat PAD sehingga akhirnya berdampak pada tingkat kemandirian daerah. Dalam peningkatan PAD, Bappenda bertanggung jawab atas peningkatan Pajak Daerah dan pengkoordinasian pendapatan lainnya secara keseluruhan. Ini berarti ranah Bappenda untuk meningkatkan PAD ada pada pos Pajak Daerah.

3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis Bappenda dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya PAD

Tabel 24
Capaian Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya (2016)	5,98%	6,41%	107,19%
Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya (2017)	8,71%	34,21%	392,77%
Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya (2018)	4,38%	-12,74%	-290,94%

Tahun 2016 PAD Kota Cimahi meningkat sebesar 6.41% dan Tahun 2017 meningkat 34.21% sedangkan Tahun 2018 menurun 12.74%.

Bila dihitung secara jangka panjang yaitu selama 5 tahun, PAD Kota Cimahi rata-rata mengalami peningkatan sebesar 11,82%.

Tabel 25
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi
2013	191,599,456,904.09
2014	227,949,120,180.56
2015	268,816,074,332.44
2016	286,049,615,484.34
2017	383,911,991,301.88
2018	334,988,775,127.39
Rata-Rata Peningkatan	11.82%

Jadi sebenarnya PAD Kota Cimahi cenderung mengalami peningkatan, namun di Tahun 2017 terjadi anomali dimana beberapa komponen PAD meningkat drastis karena faktor eksternal diluar kendali Bappenda. Di satu sisi peningkatan ini memang menguntungkan keuangan Kota Cimahi Tahun 2017, namun di sisi lain saat mengukur peningkatan PAD Tahun 2018 terjadi penurunan -12,74% sehingga seakan-akan Tahun 2018 kinerja Bappenda meningkatkan PAD dinilai buruk.

Apabila dilihat dari capaian realisasi PAD Kota Cimahi Tahun 2018 sebesar 102,49 maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kinerja Bappenda sudah tercapai dengan baik bahkan melebihi 100%. Target

PAD tahun 2018 yang ditetapkan sudah merupakan hasil proyeksi peningkatan PAD dari target Tahun 2017 yaitu sebesar 5,10%. Dengan kata lain target PAD tahun 2018 sudah meningkat 5,10% dari target PAD tahun 2017 dan realisasi pencapaian target PAD Tahun 2018 telah tercapai sebesar 102,49%.

Setelah menganalisis masalah yang terjadi maka dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah **perencanaan yang belum optimal** dalam hal ini penetapan indikator kinerja dan proyeksi Pendapatan Daerah. Pengukuran pencapaian sasaran Bappenda Kota Cimahi **“Meningkatnya PAD”** yang semula indikator kinerjanya dihitung dari **“Persentase Peningkatan Realisasi PAD dari Tahun sebelumnya”** seharusnya memperhitungkan **peningkatan target dan realisasi pencapaian targetnya dalam kondisi normal (diluar anomali/deviasi)** juga, karena target merupakan kondisi normal yang telah diperhitungkan dengan seksama namun jika hanya memperhitungkan realisasi dalam prakteknya banyak hal-hal diluar kendali Bappenda yang sewaktu-waktu dapat terjadi. **Penetapan proyeksi Pendapatan Daerah juga dirasa masih kurang optimal** karena adanya kebijakan dimana penetapan target pendapatan tertentu mengacu pada target murni walaupun pada pertengahan tahun sudah terbukti tidak akan tercapai.

Menyikapi masalah yang terjadi maka disarankan untuk melakukan beberapa koreksi, diantaranya :

- a. Penetapan proyeksi Pendapatan Daerah harus lebih akurat lagi
- b. Penghitungan realisasi indikator harus mempertimbangkan kondisi normal bila terjadi anomali diluar kendali organisasi

2. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Setiap Tahunnya

Tabel 26
Capaian Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya (2016)	5,63%	-0,06%	-1,07%
Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya (2017)	7,00%	47,59%	679,86%
Persentase peningkatan Pajak Daerah per tahunnya (2018)	5,00%	-18,52%	-370,33%

Tahun 2016 Pajak Daerah Kota Cimahi menurun sebesar 0.06% dan Tahun 2017 meningkat 47.59% sedangkan Tahun 2018 menurun 18.52%.

Selama lima tahun terakhir Pajak Daerah Kota Cimahi rata-rata meningkat 8,02% sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 27
Peningkatan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi
2013	91,644,684,568.00
2014	91,795,256,385.00
2015	112,124,306,126.00
2016	112,060,908,223.00
2017	165,391,683,082.00
2018	134,766,830,583.00
Rata-Rata	8.02%

Pajak daerah menurun di Tahun 2018, hal ini disebabkan karena BPHTB adalah jenis Pajak Daerah yang tidak dapat diprediksi besarnya karena tergantung transaksi jual beli yang terjadi. Selain itu penurunan BPHTB di Tahun 2018 terjadi karena pada Tahun 2017 terjadi anomali (sertifikasi massal dan batas akhir pembayaran Tax Amnesty) sehingga BPHTB tahun 2017 meningkat tajam diluar perhitungan. Di satu sisi peningkatan ini memang menguntungkan keuangan Kota Cimahi Tahun 2017, namun di sisi lain saat mengukur peningkatan Pajak Daerah Tahun 2018 terjadi penurunan -18,52% sehingga seakan-akan Tahun 2018 kinerja Bappenda meningkatkan Pajak Daerah dinilai buruk. Padahal bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 maka BPHTB Tahun 2018 sudah meningkat.

Menyikapi masalah yang terjadi maka disarankan untuk melakukan beberapa koreksi, diantaranya :

- a. Penetapan proyeksi Pendapatan Daerah harus lebih akurat lagi
- b. Penghitungan realisasi indikator harus mempertimbangkan kondisi normal bila terjadi anomali diluar kendali organisasi

3. Terpeliharanya Sistem Perpajakan

Tabel 28
Capaian Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah modul (2016)	-	-	-
Jumlah modul (2017)	2 paket	2 paket	100,00%
Jumlah modul (2018)	3 modul	3 modul	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

4. Tersusunnya Target Pendapatan Daerah

Tabel 29
Capaian Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah dokumen kegiatan (2016)	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
Jumlah dokumen kegiatan (2017)	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
Jumlah dokumen kegiatan (2018)	4 dokumen	4 dokumen	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

5. Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah

Tabel 30
Capaian Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan (2016)	112.000 lembar	112.000 lembar	100,00%
Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan (2017)	123.000 lembar	123.000 lembar	100,00%
Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan (2018)	150.000 lembar	150.000 lembar	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

6. Terverifikasinya Data Wajib Pajak

Tabel 31
Capaian Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi (2016)	114.361 data	114.361 data	100,00%
Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi (2017)	115.361 data	115.361 data	100,00%
Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi (2018)	134.330 data	138.786 data	103,32%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

7. Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 32
Capaian Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah	90%	100,03%	111,15%
Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah (2017)	90%	106,33%	118,14%
Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah (2018)	90%	96,89%	107,66%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

8. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak

Tabel 33
Capaian Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah (2016)	75%	75%	100,00%
Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah (2017)	75%	75%	100,00%
Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah (2018)	75%	99,08%	132,11%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

9. Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan

Tabel 34
Capaian Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi (2016)	79 kali	79 kali	100,00%
Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi (2017)	78 kali	78 kali	100,00%
Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi (2018)	72 kali	71 kali	98,61%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

10. Tersusunnya Raperda Pajak

Tabel 35
Capaian Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah dokumen Raperda Pajak (2016)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
Jumlah dokumen Raperda Pajak (2017)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
Jumlah dokumen Raperda Pajak (2018)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

11. Terawasinya objek pajak

Tabel 36
Capaian Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah objek pajak yang diperiksa (2016)	156 objek pajak	156 objek pajak	100,00%
Jumlah objek pajak yang diperiksa (2017)	1000 WP	1000 WP	100,00%
Jumlah objek pajak yang diperiksa (2018)	1200 objek pajak	1192 objek pajak	99,33%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

12. Terbinanya wajib pajak

Tabel 37
Capaian Sasaran 12

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah WP yang diberi penyuluhan (2016)	100 orang	100 orang	100,00%
Jumlah WP yang diberi penyuluhan (2017)	145 orang	145 orang	100,00%
Jumlah WP yang diberi penyuluhan (2018)	475 orang	875 orang	184,21%

Tidak mengalami permasalahan, pelaksanaan kegiatan terkendali.

Program dan kegiatan yang ada pada Bappenda saat ini sudah cukup baik dan tentunya sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian sasaran. Namun penentuan indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan

dapat disempurnakan lagi sehingga pengukuran pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan lebih akurat dan lebih baik lagi.

BAB IV

PENUTUP

Jika dilihat dari data pengukuran kinerja yang telah disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencapaian sasaran strategis Bappenda “Meningkatnya PAD” sebesar - 290,94% belum dapat dinilai akurat karena pada faktanya rata-rata kenaikan PAD selama lima tahun terakhir mencapai 11,82%. Penurunan yang terjadi di Tahun 2018 diakibatkan peningkatan drastis PAD Tahun sebelumnya/2017 akibat faktor eksternal diluar kendali Bappenda. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui adanya kurang akuratan perencanaan dalam penentuan indikator kinerja sasaran yang semula hanya persentase peningkatan realisasi PAD seharusnya mempertimbangkan juga persentase peningkatan dalam kondisi normal bila terjadi anomali diluar kendali organisasi.
2. Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Setiap Tahunnya” sebesar -370,33% belum dapat dinilai akurat karena pada faktanya rata-rata kenaikan Pajak Daerah selama lima tahun terakhir mencapai 8,02%. Penurunan yang terjadi di Tahun 2018 diakibatkan peningkatan drastis pajak BPHTB Tahun sebelumnya/2017 akibat faktor eksternal diluar kendali Bappenda. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui adanya kurang akuratan perencanaan dalam penentuan indikator kinerja sasaran yang semula hanya persentase peningkatan realisasi pajak daerah seharusnya mempertimbangkan juga persentase peningkatan dalam kondisi normal bila terjadi anomali diluar kendali organisasi.
3. Pencapaian sasaran strategis lainnya yaitu “Terpeliharanya Sistem Perpajakan”, “Tersusunnya Target Pendapatan Daerah”, “Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah”, “Terverifikasinya Data Wajib Pajak”, “Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah”, “Meningkatnya kepatuhan wajib pajak”, “Terlaksananya kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan”, “Tersusunnya Raperda Pajak”, “Terawasinya objek pajak” dan “Terbinanya wajib pajak” tidak mengalami permasalahan dan dapat tercapai dengan baik.
4. Penetapan proyeksi Pendapatan Daerah harus lebih akurat lagi
5. Berdasarkan analisis masalah yang terjadi maka sebagai tambahan dapat disimpulkan juga bahwa pengukuran kondisi peningkatan atau penurunan Pendapatan Daerah tidak cukup hanya diukur dalam satu tahun anggaran

saja tapi harus dilihat juga fluktuasi dalam lima tahun kebelakang karena data pendapatan selama lima tahun akan lebih akurat menggambarkan kondisi pendapatan suatu daerah.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 telah kami sajikan sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Kami menyadari bahwa uraian dan penjelasan LKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.